KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN
LINGKUP SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura perlu adanya dukungan Pengelola Keuangan;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/KU.010/4/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu untuk menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas Pengelola Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 137);
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3602/Kpts/KU.410/11/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kementerian Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Keuangan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014 - 2019;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/KU.010/4/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 27/KP.410/M/3/2018 tentang Perintah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian;
 2. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-018.04.1.625875/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Pengelola Anggaran Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengelola Keuangan Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 4/Kpts/HK.320/D/1/2018 tentang Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Lingkup Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SUWANDI

NIP. 19670323 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dan
Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Yang Bersangkutan.